

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan sesuatu yang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia, karena kesehatan masyarakat menjadi modal pokok dalam pertumbuhan kehidupan bangsa guna mencapai dan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.¹ Kestabilan kesehatan masyarakat dapat diusahakan dengan berbagai cara, salah satunya upaya yang biasa dilakukan adalah dengan mengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan sebagai cara untuk penyembuhan dan pencegahan berbagai macam penyakit. Konsumsi obat telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang telah dilakukan sejak jaman nenek moyang, yakni dengan memanfaatkan obat-obatan tradisional yang berasal dari sari tumbuh-tumbuhan.

Perilaku konsumtif tersebut seringkali melampaui batas dan kadang menyimpang dari aturan hukum yang ada tanpa sepengetahuan serta pemahaman dari masyarakat. Tingginya tingkat konsumsi obat-obatan oleh masyarakat mengakibatkan perlu adanya alat distribusi obat dan kelengkapan farmasi lainnya sehingga dapat menunjang kesediaan obat dimasyarakat. Distribusi obat-obatan dan perlengkapan farmasi tersebut biasa dilakukan oleh toko obat ataupun apotek yang siap melayani dengan menyediakan berbagai macam obat yang dibutuhkan

¹ Cst. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hal. 5

masyarakat. Persediaan dan peredaran obat yang bermutu tinggi, merata serta dapat dijangkau harganya oleh masyarakat selalu diusahakan baik oleh pemerintah maupun swasta melalui pendirian apotek dan toko obat di berbagai kota.

Salah satu jenis obat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk penyembuhan adalah obat-obatan daftar G (*Gevaarlijk*) yang tidak dijual secara bebas kepada masyarakat. Untuk mendapatkan obat-obatan daftar G pembeli harus dapat menunjukkan resep dari dokter. Menurut pasal 1 huruf k Undang-Undang Obat Keras (st. 1973 Nomor 641), obat daftar G adalah :

“Obat-obatan keras yang oleh *Secretaris van Staat* didaftar pada daftar obat-obatan keras”².

Sedangkan pada pasal 1 huruf a Undang-Undang Obat Keras (st. 1973 Nomor 641) obat-obat keras adalah :

“Obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain, tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak”³.

Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan, melakukan pekerjaan kefarmasian dengan menyediakan serta meyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk juga penyaluran obat-obatan daftar G. Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi apotek harus bertindak secara

² Perhuki Wilayah DKI, *Hukum Kesehatan Indonesia : Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelayanan Kesehatan Perorangan di Indonesia*, Jakarta, 1987, hal. 16.

³ Cst. Kansil, *Op. Cit.* hal. 180.

profesional dalam rangka tanggung jawab atas tugasnya tanpa mengesampingkan konsumen sebagai pemakai obat-obatan tersebut. Pekerjaan kefarmasiaan yang dilakukan oleh apotek memerlukan ketelitian, keahlian dan kecermatan karena menyangkut jiwa dan keselamatan orang banyak. Pekerjaan kefarmasiaan juga rawan akan terjadinya kesalahan, salah satunya adalah terjadi kelalaian (*negligence*) yang dilakukan oleh pihak apotek. Kelalaian tersebut dapat terjadi dalam hal penyerahan obat, pengambilan obat dan pembacaan resep, sehingga obat yang diberikan untuk dikonsumsi tidak sesuai dengan penyakit yang diderita oleh konsumen.

Salah satu peristiwa yang pernah terjadi di Surakarta adalah adanya kelalaian pihak apotek dalam menyerahkan obat. Seorang pembeli membawa resep dari dokter ke sebuah apotek untuk digunakan dalam pembelian obat daftar G, dalam resep tersebut disebutkan bahwa obat daftar G yang harus dibeli adalah obat jenis A dengan kadar 500 mg, akan tetapi terjadi kesalahan dari pihak apotek dalam penyerahan obat sehingga pembeli diberi obat jenis A dengan kadar 750 mg yang mengakibatkan pembeli tersebut mengalami kelebihan dosis hingga terjadi reaksi yang menyebabkan gangguan pada kesehatannya⁴.

Mengingat hubungan antara pembeli dengan pihak apotek tersebut mengandung resiko yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka perlu ada persetujuan diantara kedua belah pihak. Persetujuan antara pembeli

⁴ Sulastomo, *Beberapa Masalah Pelayanan Kesehatan*, Jakarta : Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, 1988. hal. 172.

obat dengan pihak apotek adalah dalam hal jumlah, jenis dan macam obat yang akan dibeli. Perjanjian antara pihak apotek dengan pembeli dalam transaksi penjualan obat-obatan daftar G tersebut termasuk dalam perjanjian timbal balik yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian uang dilakukan dalam transaksi penjualan obat-obatan daftar G tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu⁵ :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan adanya perjanjian yang telah dilakukan antara pembeli dengan pihak apotek dalam penjualan obat daftar G, maka timbulnya kelalaian (*negligence*) dapat dikategorikan dalam perbuatan *wanprestasi*. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh apotek dalam penjualan obat daftar G tersebut adalah bahwa prestasi yang diberikan oleh apotek tidak sebagaimana mestinya (keliru) yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain yaitu pembeli.

Sebagai akibat dari adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak apotek, maka harus ada suatu bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban atas kelalaian yang dimaksud

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, hal. 339.

adalah kelalaian yang dapat disebabkan karena adanya tindakan wanprestasi atau adanya suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*)⁶.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“HUKUM DAN APOTEK (Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Apotek dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G di Surakarta)”**.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian skripsi mengarah pada pembahasan yang diharapkan serta tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian, maka penulis membatasi permasalahan pada aspek perjanjian yang terjadi dalam penjualan obat-obatan daftar G (*Gevaarlijk*) antar pembeli dan pihak apotek.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola-pola penjualan obat-obatan daftar G oleh apotek di Surakarta ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak apotek apabila terjadi kesalahan dalam penjualan obat-obatan daftar G ?

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Prenada Media, 2004. hal. 116.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini pada garis besarnya terbagi menjadi dua tujuan yaitu :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mendeskripsikan tentang pola-pola penjualan obat-obatan daftar G oleh apotek di Surakarta.
 - b. Untuk mendeskripsikan mengenai tanggung jawab pelaku usaha (apotek) jika terjadi kesalahan dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama perkuliahan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan studi ilmu hukum.
 - b. Memperluas dan memperdalam pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum kesehatan mengenai tanggung jawab apotek dalam penjualan obat-obatan daftar G.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengkaji guna memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk kemajuan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada.

- b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum perdata tentang perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya dengan upaya memperkaya khasanah keilmuan, khususnya menyangkut tanggung jawab apotek dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini mengutamakan data primer yang diperoleh di lapangan dengan tidak mengesampingkan data-data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

2. Jenis Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986. hal. 52.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan secara faktual, akurat dan sistematis tentang pola-pola penjualan obat daftar G dan tanggung jawab apotek apabila terjadi kesalahan dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Surakarta, dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa Surakarta merupakan pusat perdagangan obat yang padat bagi daerah-daerah lain di sekitarnya dengan jumlah apotek yang relatif banyak, sehingga cukup relevan untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara di lapangan. Wawancara dilakukan secara terarah dan sistematis dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang obyek yang diteliti serta melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap pelaksanaan perjanjian antara pembeli dengan pihak apotek dalam penjualan obat-obatan daftar G di Surakarta.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis, literature, arsip dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini.⁸

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

- Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan para informan yang mengetahui dan memahami tentang masalah yang diteliti.

- Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap data-data yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi Pustaka

Yakni dengan mengumpulkan data atau bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

⁸ Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2002, hal. 38.

- Reduksi data

Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

- Menyajikan data

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar skema jaringan kerja juga tabel.

- Menarik kesimpulan (*Verifikasi*)

Setelah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, alur sebab akibat akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini maka dapat digambarkan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Obat-obatan Daftar G

1. Pengertian Obat
2. Jenis-jenis obat
3. Pengertian dan landasan hukum obat daftar G

B. Tinjauan Umum Tentang Apotek

1. Pengertian dan landasan hukum Apotek
2. Kewajiban apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan
3. Bentuk tanggung jawab apotek

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian
2. Asas-asas dalam perjanjian
3. Syarat sah perjanjian
4. Subyek dalam perjanjian
5. Unsur-unsur dalam perjanjian
6. Overmacht dan akibat hukumnya
7. Resiko
8. Wanprestasi dan akibat hukumnya
9. Perjanjian Jual Beli

D. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Penjualan Obat-Obatan Daftar G Oleh Apotek di Surakarta.

B. Tanggung Jawab Pihak Apotek Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Oleh Apotek di Surakarta.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN